

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang didukung data dan informasi yang telah dikemukakan sebelumnya, penulis menarik kesimpulan bahwa Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Menurut Perspektif Islam di Kabupaten Kuningan adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Kuningan terdapat 3 tahap yaitu Pertama, Pendataan yang terdiri dari Nomor Objek Pajak, Penilaian Objek Pajak, Pelaksanaan Penilaian dan Proses Penghitungan Nilai. Kedua, Pengenaan yang terdiri dari Penentuan NJOP, Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP), Tarif PBB dan Perhitungan PBB. Ketiga, Penagihan yang terdiri dari Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Surat Tagihan Pajak dan Surat Ketetapan Pajak.
2. Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Menurut Perspektif Islam di Kabupaten Kuningan telah memenuhi prinsip-prinsip ekonomi Islam hal ini dapat dilihat dari proses pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang ditemukan peneliti dalam hal ini BAPPENDA relevan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang terdiri dari Tauhid (Ketuhanan), Musyawarah, Keadilan dan Keseimbangan, Kebebasan, Amanah (Kepatuhan).

#### **B. Saran Saran**

Untuk meningkatkan Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Menurut Perspektif Ekonomi Islam di Kabupaten Kuningan agar kedepannya jauh lebih baik lagi, maka saran peneliti yang bisa disampaikan dalam penelitian ini :

1. Pemerintah harus lebih peka, bijak, adil, dan tidak mementingkan kepentingan diri sendiri atau kelompok tertentu dalam mengambil keputusan yang menyangkut kepentingan hidup masyarakat terutama mengenai Pajak Bumi dan Bangunan. Sehingga peraturan dan kebijakan yang dikeluarkan tidak memberatkan, bersifat netral, dan tidak ada konspirasi didalamnya yang akhirnya bisa menimbulkan pihak-pihak yang terzalimi karenanya.

2. Pemerintah harus lebih memperhatikan keadilan dalam distribusi pajak khususnya PBB karena hal ini berkaitan dengan kebutuhan dan kepentingan untuk mensejahterakan masyarakat sebagai tujuan awal dari pemungutan pajak dan sudah menjadi tanggung jawab pemerintah untuk lebih peka dengan kepentingan masyarakat.

